



Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2020

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan**

Jl. Bangun Praja, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
BANJARBARU 70733
Telp/Fax 0511-6749344



dpmptsp.kalselprov.go.id



[dpmptspkalsel](https://www.facebook.com/dpmptspkalsel)



[dpmptspkalsel](https://www.instagram.com/dpmptspkalsel)



[dpmptspkalsel](https://twitter.com/dpmptspkalsel)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayah-nya juaah kami telah berhasil menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2019 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

LKPJ dan LPPD ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Gubernur Kalimantan Selatan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

LKPJ dan LPPD ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan umumnya pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Banjarbaru, Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan,

Ir. H. NAFARIN, MP
Pembina Utama Muda
NIP 19620513 198903 1 011

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| Daftar Gambar | iv |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| Bab II Isu Strategis Organisasi | 2 |
| Bab III Urusan Desentralisasi | 4 |
| A. Program dan Kegiatan | 4 |
| B. Tingkat Pencapaian Standar Minimal Pelayanan | 6 |
| C. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan | 6 |
| D. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib/Pilihan | 19 |
| E. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional | 20 |
| F. Alokasi dan Realisasi Anggaran | 23 |
| G. Proses Perencanaan Pembangunan | 27 |
| H. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (Lengkap, Kurang, Mencukupi atau Lainnya) | 29 |
| I. Permasalahan dan Solusi | 34 |
| J. Prestasi/Penghargaan yang Diraih | 36 |
| K. Hal-Hal Lain yang Dianggap Perlu Dilaporkan | 36 |
| Bab IV Dekonsentrasi | 37 |
| Bab V Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan | 39 |
| Bab VI Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Tahun 2019 | 41 |
| Bab VII Penutup | 45 |
| Lampiran | 48 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 3.1. | Indikator Kinerja, Target, dan Realisasi 2019 | 6 |
| Tabel 3.2. | Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan | 21 |
| Tabel 3.3. | Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan | 22 |
| Tabel 3.4. | Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional | 23 |
| Tabel 3.5. | Laporan Konsolidasi Bulanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2018 | 24 |
| Tabel 3.6. | Kondisi Sarana dan Prasarana | 30 |
| Tabel 4.1. | Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 | 37 |
| Tabel 6.1. | Tataran Pengambil Kebijakan | 41 |
| Tabel 6.2. | Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Selatan | 42 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3.1. Hubungan Visi dan Misi | 28 |
|--|----|

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan beberapa unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Daerah / SKPD berkewajiban menyusun Rencana Strategis dalam 5 tahun mendatang dan Permengari Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga yang melayani urusan terkait investasi dan pelayanan terhadap masyarakat terkait penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016. Bahwasanya DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kegiatan terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta agar mampu eksis dan berhasil dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan dan mengantisipasi terhadap perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang diharapkan.

BAB II

ISU STRATEGIS ORGANISASI

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran isu dan kondisi yang ada sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian global, berdampak pada harga komoditi ekspor kalsel, mengalami perlambatan ekonomi yaitu dari 5,35% (2013) menjadi 4,85% (2014) dan 3,84% (2015)
2. Investasi di kalsel, s.d. tahun 2014 masih relative menarik, terutama di sektor tambang
3. Daya tarik investasi di sektor tersebut juga mengalami perlambatan.

Adapun beberapa permasalahan umum yakni :

1. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik
2. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui:
 - a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
 - b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
 - c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
 - d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.

Dari permasalahan tersebut, melalui Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan.

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan fungsi dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dari tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi dua dan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;
2. Belum teridentifikasinya data potensi daerah;
3. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
4. Belum optimalnya promosi investasi;
5. Ketidakmerataan penanaman modal;
6. Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
7. Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Pelayanan belum optimal;
9. Terbatasnya sumber daya manusia;
10. Kurangnya sarana dan prasarana;
11. Belum tersedianya perangkat lunak dan sistem informasi pelayanan untuk meningkatkan pengawasan perizinan dan akuntabilitasnya dapat lebih dijamin;
12. Keterbatasan Anggaran.

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. Belum optimalnya investasi di Kalimantan Selatan; dan
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2019 melaksanakan sebanyak 6 (enam) program pembangunan yang terdiri dari 4 (empat) program rutin (kesekretariatan) dan 2 (dua) program Urusan Penanaman Modal sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur;
5. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan
6. Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan.

Dari program tersebut di atas, dijabarkan menjadi kegiatan. Adapun kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - f. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - g. Penataan Perpustakaan
 - h. Penyediaan Jasa Teknis Perizinan
 - i. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
 - j. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan
 - k. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - e. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan dan Pelaporan Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
 - c. Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Dan Aset SKPD
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal
 - b. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha
 - c. Penyelenggaraan Pameran Investasi
 - d. Identifikasi Potensi dan Evaluasi Kebijakan Investasi
 - e. Forum Investasi Kalimantan Selatan
 - f. Pengendalian Pelaksanaan Investasi Dalam Rangka Fasilitasi Penyelesaian Masalah
5. Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan, dengan kegiatan:
 - a. Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Sosialisasi Perizinan
 - b. Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Perizinan dan Evaluasi Perizinan
 - c. Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM berbasis ISO 9001
 - d. Pelayanan Penanaman Modal.

B. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL PELAYANAN

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 610/9803/Bangda tanggal 20 Desember 2017 tentang pelaporan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana tidak terdapat SPM pada urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, Sasaran utama penanaman modal yang ingin dicapai pada tahun 2019 yakni **peningkatan investasi**. Target realisasi investasi PMA dan PMDN adalah sebesar Rp10,5 triliun. Selain itu juga ditargetkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan predikat B (nilai 82,50) serta indikator tambahan berupa nilai persetujuan investasi (rencana investasi) sebesar Rp11,7 triliun. Adapun rincian pencapaian target SKPD disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Indikator Kinerja, Target, dan Realisasi 2018, 2019

| No | Indikator Kinerja | Target 2018 | Realisasi 2018 | Target 2019 | Realisasi 2019 |
|----|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | Realisasi Investasi PMA dan PMDN | 9.200.000.000.000 | 11.705.600.000.000 (127,23%) | 10.500.000.000.000 | 15.654.500.00.000 (149,06%) |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B (80) | B (82,61) (103,26%) | B (82,50) | B (86.79) |

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis pada DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan 3 (tiga) indikator didalamnya, dimana salah satunya menjadi indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021.

Dalam perencanaan program kerja tahun 2019, DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator

kinerja kegiatan. Kelompok indikator *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Sedangkan indikator *output* merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya.

Indikator *outcome* merupakan indikator yang terbentuk karena adanya *output*, yang bisa berupa pemanfaatan *output* yang dapat diukur dalam jangka pendek (*intermediate outcome*). Untuk menilai atau mengukur *capaian kinerja*, menggunakan tolok ukur *indikator sasaran* yang melekat pada kegiatan.

Pada indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN ditargetkan sebesar 10,5 triliun rupiah. Adapun realisasinya sebesar **15,6 triliun rupiah**, sehingga kinerja mencapai **149,09%**.

Pada indikator Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi ditargetkan sebesar 11,7 triliun rupiah. Adapun realisasinya sebesar **18,6 triliun rupiah**, sehingga kinerja mencapai **159,67%**.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan B dengan nilai 82,50. Adapun realisasinya adalah **B dengan nilai 86,79**, sehingga kinerja mencapai **105,20%**.

Indikator DPMPSTSP (DPMPSTSP) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 pada urusan penanaman modal yakni: Realisasi Investasi dengan target 10,5 triliun rupiah.

Capaian realisasi investasi pada tahun 2019 sebesar 15,6 triliun rupiah atau 149,09%. Realisasi investasi telah mencapai target yang telah ditetapkan. Disisi lain juga rencana investasi atau sering disebut juga dengan minat investasi (berdasarkan persetujuan/Izin prinsip/tanda daftar) mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan iklim investasi khususnya di Kalimantan Selatan semakin diminati dan bertumbuh kembang. Dengan kata lain Investor berminat untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan investasi:

1. Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD dan Dekonsentrasi APBN

2. Himbuan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
4. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
5. Promosi Investasi
6. Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi
7. Inovasi SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin), agar izin yang semula tidak masuk skema penanaman modal menjadi masuk dari bagian penghitungan investasi, sehingga dapat memacu peningkatan realisasi investasi.
8. Perbaiki iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS)
9. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat dan prosedur)
Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan:
 1. Penyesuaian persyaratan, spesifikasi, dan biaya/tarif yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
 2. Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan lingkup pemerintah provinsi kepada DPMPTSP Prov.Kalsel sebanyak 18 bidang dan 132 jenis perizinan dan nonperizinan.
 3. Pengelompokkan prosedural pengurusan perizinan dan nonperizinan menjadi 3 (tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP): 1. Dengan pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan, 2. Tanpa pertimbangan teknis dengan peninjauan lapangan, dan 3. Tanpa pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan. Prosedural yang dibuat adalah untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam berurusan. Telah dilakukan pemangkasan proses untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat.

4. Konsistensi implementasi maklumat pelayanan yang menyatakan bahwa aparat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik, dan apabila tidak ditepati, siap menerima sanksi yang berlaku.
5. Reward petugas pelayanan terbaik
6. Penyediaan dan Penambahan tenaga *Front Officer*
7. Tersedianya *Help Desk*
8. Implementasi perizinan secara *online* dengan Sistem Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN) dan *Online Single Submission* (OSS)
9. *Digital Signature* untuk percepatan dan kemudahan perizinan nonperizinan.
10. Pembentukan Satuan Petugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kalimantan Selatan serta keaktifan didalamnya
11. Implementasi ISO 9001:2015.

Program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Namun untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Pada tahun anggaran 2019, DPMPTSP Prov.Kalsel melaksanakan 6 (enam) Program yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Adapun Tingkat pencapaian program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

I. Program Kegiatan Non-Urusan (rutin perkantoran dan kesekretariatan)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi kinerja (fisik) sebesar 100,00%, dengan Kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%

- Penyediaan Bahan Logistik dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penyediaan makanan dan minuman dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penataan perpustakaan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penyediaan jasa teknis perizinan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Penyediaan alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%, dengan kegiatan :**
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- 3. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%, dengan kegiatan :**
- Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Pengadaan pakaian kerja dan hari-hari tertentu dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%, dengan kegiatan :

- Penyusunan dan pelaporan keuangan dan aset SKPD dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00% dengan hasil 1 dokumen laporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan dan pelaporan kinerja SKPD dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00% dengan hasil 5 dokumen perencanaan dan pelaporan.
- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan realisasi kinerja (fisik) dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00% dengan hasil 2 dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

II. Program Kegiatan Urusan Penanaman Modal

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.971.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp2.819.511.600,- atau 94,76% dan realisasi fisik sebesar 94,88%. Kegiatan–kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain

:Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.048.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp1.017.808.600,00 atau 97,12% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:

- a. Tersedianya 1 orang Pengelola Pameran dan Kemitraan yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun
- b. Terlaksananya kegiatan koordinasi ke BKPM RI
- c. Terpasangnya baliho promosi investasi di 2 media promosi, berlokasi di Jakarta dan bandara Syamsudin Noor Banjarmasin
- d. Mengikuti beberapa pameran investasi di dalam negeri, yaitu:
 - 1) Pameran Investasi Gelar UMKM/IKM dan Investasi Daerah 2019 di Bali pada tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 01 April 2019.

- 2) Pameran Investasi ke BITTRA Bandung Expo 2019 di Bandung pada tanggal 03 April 2019 sampai dengan 07 April 2019
 - 3) Pameran Investasi ke PPIP Surabaya Expo 2019 di Surabaya pada tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019
 - 4) Pameran Investasi ke Pameran Produk Khas/Unggulan dan Peluang Investasi Daerah di Kota Batam pada tanggal 14 Maret sampai dengan 18 Maret 2019
 - 5) Kalsel Expo di Banjarbaru pada tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan 03 September 2019
- e. Prestasi/ penghargaan yang diraih antara lain:
- 1) Juara II Stand Terbaik Pameran Produk Khas/Unggulan dan Peluang Investasi Daerah di Batam
 - 2) Juara I Stand Terbaik UMKM/IKM dan Investasi Daerah 2019 di Bali
 - 3) Juara I stand terbaik BITTRA Bandung Expo 2019 di Bandung
 - 4) Stand terbaik Bidang Informasi Investasi MIATTEX EXPO 2018
 - 5) Stand terbaik Pameran Investasi ke PPIP Surabaya Expo 2019 di Surabaya

Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp350.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp320.095.650,00 atau 91,46% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

- a. Terjalannya kemitraan dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha antara UMKM Borneo Bu Mun (Ibu Sulistiyoningsih) dengan Amang Ojek (Bapak M Nicko Farizki) bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 18 Juni 2019
- b. Terjalannya kemitraan dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha antara UMKM VCO Rumah Banjar (Ibu Dra Asmah) dengan Amang Ojek (Bapak M Nicko Farizki) bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 18 Juni 2019
- c. Terjalannya kemitraan dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha antara UMKM Borneo Bu Mun (Ibu Sulistiyoningsih) dengan Bu Kus Katering Nusa Tenggara barat (Ibu Wagini, SH) bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 21 Juni 2019
- d. Terjalannya kemitraan dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha antara UMKM VCO Rumah Banjar (Ibu Dra Asmah) dengan UD Cahaya Langit (Bapak Sofyan Sandi) bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 21 Juni 2019
- e. Terjalannya kemitraan dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha antara UMKM VCO Rumah Banjar (Ibu Dra Asmah) dengan Al Min Nusa Tenggara Barat (Bapak Zulhadi) bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 21 Juni 2019

- f. Terjalinnnya kemitraan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Amang Ojek (Bapak M Nicko Farizki) bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 18 Juni 2019
- g. Terjalinnnya kemitraan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dengan LPB PPKP (Layanan Pengembangan Bisnis Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan pengusaha Kecil) Mataram pada tanggal 21 Juni 2019
- h. Tersedianya rekapitulasi data UMKM Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Selatan
- i. Terlaksananya Matchmaking / Kemitraan Dunia Usaha untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah” bertempat di HBI Hotel Banjarmasin pada tanggal 17 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2019 yang dihadiri UMKM, DPMPTSP Kab/Kota.

Kegiatan Identifikasi Potensi dan Evaluasi Kebijakan Investasi

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp350.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp331.539.150,00 atau 94,73% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:

- a. Terlaksananya Rapat Koordinasi Deregulasi Penanaman Modal bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 02 Mei 2019
- b. Terlaksananya Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 03 Juli 2019

- c. Disusunnya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 021 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021
- d. Tersedianya Laporan Identifikasi Potensi Kerbau Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kegiatan Forum Investasi Kalimantan Selatan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp410.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp404.177.350,00 atau 98,58% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Forum Investasi Kalimantan Selatan Tahun 2019 bertempat di Hotel Aston - Batam pada tanggal 11 Juli 2019 yang dihadiri oleh 100 peserta terdiri dari:

1. Tersedianya 1 orang Tenaga Kontrak Pengelolaan Pemetaan Sumber Daya Investasi yang difasilitasi Jaminan Sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun
2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Promosi Investasi Kalimantan Selatan Tahun 2019 bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 17 Juni 2019 yang dihadiri oleh :
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
 - b. DPMPTSP kabupaten/Kota Kalimantan Selatan
 - c. Perwakilan Founder StarUp Kalimantan Selatan
3. Tersedianya Spanduk Promosi untuk berbagai acara selama 1 tahun
4. Buku Saku Rencana Pola Ruang Wilayah Dasar (Sektor Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan)
5. Basis Perda 9/2015 RT RW 2015-2035 Provinsi Kalimantan Selatan (South Kalimantan Investment Opportunities Easy and Profitable) tersedianya brosur promosi rumput laut
6. Tersedianya buku peluang investasi Kalimantan Selatan

7. Terlaksananya kegiatan Forum Investasi Kalimantan Selatan Tahun 2019 bertempat di Bali Room Gran Lotus Batam Hotel Hotel pada tanggal 11 Juli 2019 yang dihadiri oleh 100 peserta terdiri dari
- a. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
 - b. Walikota Banjarbaru
 - c. Kantor Dagang Industri Kota Batam
 - d. Perwakilan dari Investor Malaysia, Singapuram dan Investor Kota Batam
 - e. Pejabat SKPD teknis terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
 - f. Perwakilan DPMPTSP kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
 - g. Para Pengusaha Kota Batam

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Investasi Dalam Rangka Fasilitas Penyelesaian Masalah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp363.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp344.678.600,00 atau 94,95% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:

- a. Terlaksananya Rapat Percepatan Realisasi Penanaman Modal bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 11 Oktober 2019
- b. Terlaksananya pengawasan, monitoring dan pembinaan proyek PMA/PMDN Kabupaten/Kota se Kalsel, dengan rincian Kota Banjarmasin sebanyak 5 kali, Kota Banjarbaru 3 Kali, kabupaten Banjar 4 kali, Kabupaten Barito Kuala 4 kali, Kabupaten Tapin 4 kali, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4 kali, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 3 kali, Kabupaten Hulu Sungai Utara 3 Kali, Kabupaten Balangan 4 kali, Kabupaten Tabalong 4 kali, Kabupaten Tanah Laut 5 kali, Kabupaten Tanah Bumbu 5 kali, Kabupaten Kotabaru 5 kali.

Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp450.800.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp401.212.250,00 atau 89,00% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

- a. Tersedianya buku Rekapitulasi Laporan kegiatan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan
- b. Tersedianya Buku Perkembangan Investasi Provinsi Kalimantan Selatan
- c. Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Data Penanaman Modal Kalimantan Selatan Tahun 2019 bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 24 Juli 2019
- d. Terlaksananya belanja jasa tenaga ahli Pengembangan Aplikasi SIMAPAN oleh PT. Afsar Primula Solusindo dengan nilai kontrak Rp49.500.000
- e. Terlaksananya belanja modal software Sistem Keamanan Informasi oleh Cv Deyan Putra Utama dengan nilai kontrak Rp33.700.000
- f. Terlaksananya Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online Se Kalimantan Selatan Tahun 2019 bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 10 Oktober 2019
- g. Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam rangka Pemutakhiran Data dan Informasi Kab/Kota se Kalsel sebesar Rp40.710.000
- h. Tersedianya Aplikasi SIMAPAN Platform android diplaystore
- i. Terpasangnya Sistem Keamanan Informasi di Aplikasi SIMAPAN

2. Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.113.842.750,- dan terealisasi sebesar Rp1.066.658.350,- atau 95,76% dan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

Kegiatan Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial dengan Instansi terkait dan Kab/Kota se Kalsel

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp360.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp351.330.050,00 atau 97,59% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah

- a. Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka penerbitan Bidang produksi dan industri serta perizinan bidang sarana perekonomian dan sosial.
- b. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Perizinan Bidang Produksi dan Industri (sektor Ketenagalistrikan) bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 30 Juli 2019
- c. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Perizinan Bidang Produksi dan Industri (Sektor Perikanan) bertempat di Halaman Kantor Pelabuhan Perikanan Batulicin pada tanggal 23 April 2019
- d. Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi PT.KEL
- e. Terlaksananya Rapat Koordinasi PT Yurda Ardisenggara tentang Izin Nasional
- f. Terlaksananya Rapat Koordinasi PT Makmur Sejahtera Wisaya Tentang Kewenangan Izin Sipa.
- g. Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka koordinasi, konsultasi, atau konsolidasi perizinan.

Kegiatan Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Perizinan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp268.842.750 . Serapan keuangan sebesar Rp262.054.500 atau 97,48% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya peninjauan lapangan dalam rangka penerbitan perizinan bidang produksi dan industri serta perizinan bidang sarana perekonomian dan sosial.

Kegiatan Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbasis ISO 9001

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp150.000.000 . Serapan keuangan sebesar Rp146.456.200,00 atau 97,64% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Terlaksananya *Refreshing Course Re Awarness* ISO 9001:2015 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 04 Februari 2019.
- 2) Terlaksananya Benchmark ISO 9001:2015 di Graha PT Sucopindo (Persero) Pusat Jakarta pada tanggal 8 Februari 2019
- 3) Diperolehnya Sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 Quality Management Systems-Requirements untuk 7 pelayanan publik di bidang perizinan produksi dan industri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp335.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp306.817.600,00 atau 91,59% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Perizinan Terintegrasi secara Elektronik melalui OSS, yang diikuti oleh Pegawai dari PTSP Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Selatan bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 14 November 2019
- 2) Terlaksananya Kegiatan Workshop Aplikasi dan Regulasi Terbaru tentang Kebijakan Penanaman Modal Tahun 2019, yang diikuti oleh Pegawai dari PTSP Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Selatan bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 26 September 2019
- 3) Terlaksananya Forum Diskusi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS) Tahun 2019 bertempat di Hotel Novotel Jakarta pada tanggal 30 April 2019

D. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN WAJIB/PILIHAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan.

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelayanan Publik di bidang perizinan dan nonperizinan produksi dan industri, dari tugas-tugas pokok tersebut dapat diketahui fungsi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat mebarik penanaman modal;
4. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
5. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
6. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial; dan
7. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

E. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap susunan kepegawaian yang dimiliki DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut :

Sumberdaya manusia pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Serjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 3.2

Tabel 3.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

| No | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah | | Total | Ket |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | L | P | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | - | - | - | |
| 2 | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) | - | - | - | |
| 3 | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) | 7 | 2 | 9 | |
| 4 | Diploma Satu (D-I) | - | - | - | |
| 5 | Diploma Dua (D-II) | - | - | - | |
| 6 | Diploma Tiga (D-III) | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Diploma Empat (D-IV) | 1 | - | 1 | |
| 8 | Sarjana (S-1) | 18 | 8 | 26 | |
| 9 | Sarjana (S-2) | 13 | 4 | 17 | |
| 10 | Sarjana (S-3) | - | - | - | |
| | Jumlah PNS | 39 | 15 | 54 | |
| 1 | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) | 7 | - | 7 | *) |
| 2 | Sarjana (S-1) | 10 | 7 | 17 | *) |
| | Jumlah Non PNS | 17 | 7 | 24 | |
| | Jumlah Seluruh Karyawan DPMPTSP | 56 | 23 | 79 | |

Keterangan : *) Pegawai Tenaga Kontrak

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 54 (lima puluh empat) orang kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan sebagaimana tercantum pada tabel 3.3

Tabel 3.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

| No | Pangkat dan Golongan | Jumlah | | Total | Ket |
|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | L | P | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | II/a Pengatur Muda | - | - | - | |
| 2 | II/b Pengatur Muda Tk.I | - | - | - | |
| 3 | II/c Pengatur | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | II/d Pengatur Tk.I | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | III/a Penata Muda | 4 | 2 | 6 | |
| 6 | III/b Penata Muda Tk.I | 8 | 3 | 11 | |
| 7 | III/c Penata | 8 | 6 | 14 | |
| 8 | III/d Penata Tk.I | 7 | 2 | 9 | |
| 9 | IV/a Pembina | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | IV/b Pembina Tk.I | 5 | - | 5 | |
| 11 | IV/c Pembina Utama Tk.I | 1 | - | 1 | |
| 12 | IV/d Pembina Utama | - | - | - | |
| | JUMLAH | 39 | 15 | 54 | |

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

| No | Struktural dan Fungsional | Jumlah | | Total |
|----|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | L | P | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Eselon I | - | - | - |
| 2 | Eselon II.A | 1 | - | 1 |
| 3 | Eselon III.A | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Eselon IV.A | 12 | 3 | 15 |
| 5 | Fungsional Tertentu | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Non Struktural / Fungsional Umum | 19 | 10 | 29 |
| | Jumlah | 39 | 15 | 54 |

F. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 adalah terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp6.348.501.000 dan Belanja Langsung (BL) untuk pelaksanaan program kegiatan sebesar Rp9.960.242.750. Adapun realisasi anggaran sebesar 95,80% BL dan 94,66% BTL. Sedangkan realisasi fisik berupa output kegiatan sebesar 100,00%.

Realisasi anggaran Belanja Langsung DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Laporan Konsolidasi Bulanan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2019

| No. | Program /No.DPA/ Kegiatan | Pagu Dana | Realisasi | Serapan | | Satuan Unit | Sisa Pagu |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| | | | | KEU | FISIK | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.529.000.000,00 | 3.369.971.677,00 | 95,49% | 100.00 | | 159.028.323,00 |
| 1 | • Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 583.000.000,00 | 537.846.477,00 | 92,25% | 100.00 | 12 bulan | 45.153.523,00 |
| 2 | • Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 198.000.000,00 | 187.111.400,00 | 94,50% | 100.00 | 12 bulan | 10.888.600,00 |
| 3 | • Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 43.000.000,00 | 42.962.900,00 | 99,91% | 100.00 | 12 bulan | 37.100,00 |
| 4 | • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 70.000.000,00 | 69.836.000,00 | 99,77% | 100.00 | 12 bulan | 164.000,00 |
| 5 | • Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 350.000.000,00 | 283.525.500,00 | 81,01% | 100.00 | 12 bulan | 66.474.500,00 |
| 6 | • Penyediaan Makanan dan Minuman | 380.000.000,00 | 356.618.000,00 | 93,85% | 100.00 | 11 bulan | 23.382.000,00 |
| 7 | • Penataan Perpustakaan | 70.000.000,00 | 69.920.300,00 | 99,89% | 100.00 | 12 bulan | 79.700,00 |
| 8 | • Penyediaan Jasa Teknis Perizinan | 260.000.000,00 | 259.812.500,00 | 99,93% | 100.00 | 12 bulan | 187.500,00 |
| 9 | • Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor | 240.000.000,00 | 237.336.500,00 | 98,89% | 100.00 | 12 bulan | 2.663.500,00 |
| 10 | • Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan | 225.000.000,00 | 219.865.600,00 | 97,72% | 100.00 | 12 bulan | 5.134.400,00 |
| 11 | • Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1.110.000.000,00 | 1.105.136.500,00 | 99,56% | 100.00 | 12 bulan | 4.863.500,00 |
| No. | Program /No.DPA/ Kegiatan | Pagu Dana | Realisasi | Serapan | | Satuan Unit | Sisa Pagu |

| | | | | KEU | FISIK | | |
|-----|--|------------------|------------------|---------|--------|-------------|---------------|
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.778.000.000,00 | 1.694.434.748,00 | 95,30% | 100.00 | | 83.565.252,00 |
| 12 | • Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 545.000.000,00 | 539.450.000,00 | 98,98% | 100.00 | 2 buah | 5.550.000,00 |
| 13 | • Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 550.000.000,00 | 548.810.698,00 | 99,78% | 100.00 | 12 bulan | 1.189.302,00 |
| 14 | • Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 300.000.000,00 | 239.863.600,00 | 79,95% | 100.00 | 12 bulan | 60.136.400,00 |
| 15 | • Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 270.000.000,00 | 254.465.450,00 | 94,25% | 100.00 | 18 Unit | 15.534.550,00 |
| 16 | • Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 113.000.000,00 | 111.845.000,00 | 98,98% | 100.00 | 12 bulan | 1.155.000,00 |
| III | Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan | 322.600.000,00 | 311.117.900,00 | 96,44% | 100.00 | | 11.482.100,00 |
| 17 | • Penyusunan dan Pelaporan Keuangan dan Aset SKPD | 15.600.000,00 | 9.700.000,00 | 62,18% | 100.00 | 1 dokumen | 5.900.000,00 |
| 18 | • Penyusunan dan pelaporan Kinerja SKPD | 261.000.000,00 | 255.457.900,00 | 97,88% | 100.00 | 5 dokumen | 5.542.100,00 |
| 19 | • Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat | 46.000.000,00 | 45.960.000,00 | 99,91% | 100.00 | 2 dokumen | 40.000,00 |
| IV | Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur | 245.000.000,00 | 243.271.800,00 | 99,29% | 100.00 | | 1.728.200,00 |
| 20 | • Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur | 160.000.000,00 | 158.949.500,00 | 99,34% | 100.00 | 19 Orang | 1.050.500,00 |
| 21 | • Pengadaan pakaian Kerja dan Hari-hari Tertentu | 85.000.000,00 | 84.322.300,00 | 99,20% | 100.00 | 256 Stell | 677.700,00 |
| No. | Program /No.DPA/ Kegiatan | Pagu Dana | Realisasi | Serapan | | Satuan Unit | Sisa Pagu |

| | | | | KEU | FISIK | | |
|----|--|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| V | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 2.971.800.000,00 | 2.856.211.600,00 | 96,11% | 100.00 | | 115.588.400,00 |
| 22 | • Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha | 350.000.000,00 | 320.095.650,00 | 91,46% | 100.00 | 5 kemitraan | 29.904.350,00 |
| 23 | • Penyelenggaraan Pameran Investasi | 1.048.000.000,00 | 1.017.808.600,00 | 97,12% | 100.00 | 5 Kali | 30.191.400,00 |
| 24 | • Forum Investasi Kawasan Industri Kalimantan Selatan | 410.000.000,00 | 404.177.350,00 | 98,58% | 100.00 | 1 Kegiatan | 5.822.650,00 |
| 25 | • Identifikasi Potensi dan Evaluasi Kebijakan Investasi | 350.000.000,00 | 331.539.150,00 | 94,73% | 100.00 | 1 Dokumen 1 Dokumen (Berita Acara) | 18.460.850,00 |
| 26 | • Pengendalian Pelaksanaan Investasi Dalam Rangka Fasilitasi Penyelesaian Masalah | 363.000.000,00 | 344.678.600,00 | 94,95% | 100.00 | 58% | 18.321.400,00 |
| 27 | • Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal | 450.800.000,00 | 437.912.250,00 | 97,14% | 100.00 | 12 Bulan | 12.887.750,00 |
| 7 | Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan | 1.113.842.750,00 | 1.066.658.350,00 | 95,76% | 100.00 | | 47.184.400,00 |
| 28 | • Pelayanan Penanaman Modal | 335.000.000,00 | 306.817.600,00 | 91,59% | 100.00 | 3 Kali | 28.182.400,00 |
| 29 | • Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbaris ISO 9001 | 150.000.000,00 | 146.456.200,00 | 97,64% | 100.00 | 1 dokumen | 3.543.800,00 |
| 30 | • Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Perizinan dan Evaluasi Perizinan | 268.842.750,00 | 262.054.500,00 | 97,48% | 100.00 | 12 Bulan | 6.788.250,00 |
| 31 | • Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait dan Sosialisasi Perizinan | 360.000.000,00 | 351.330.050,00 | 97,59% | 100.00 | 4 Kali | 8.669.950,00 |
| | Total | 9.960.242.750,00 | 9.541.666.075,00 | 95,80% | 100.00 | | 418.576.675,00 |

G. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's.

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

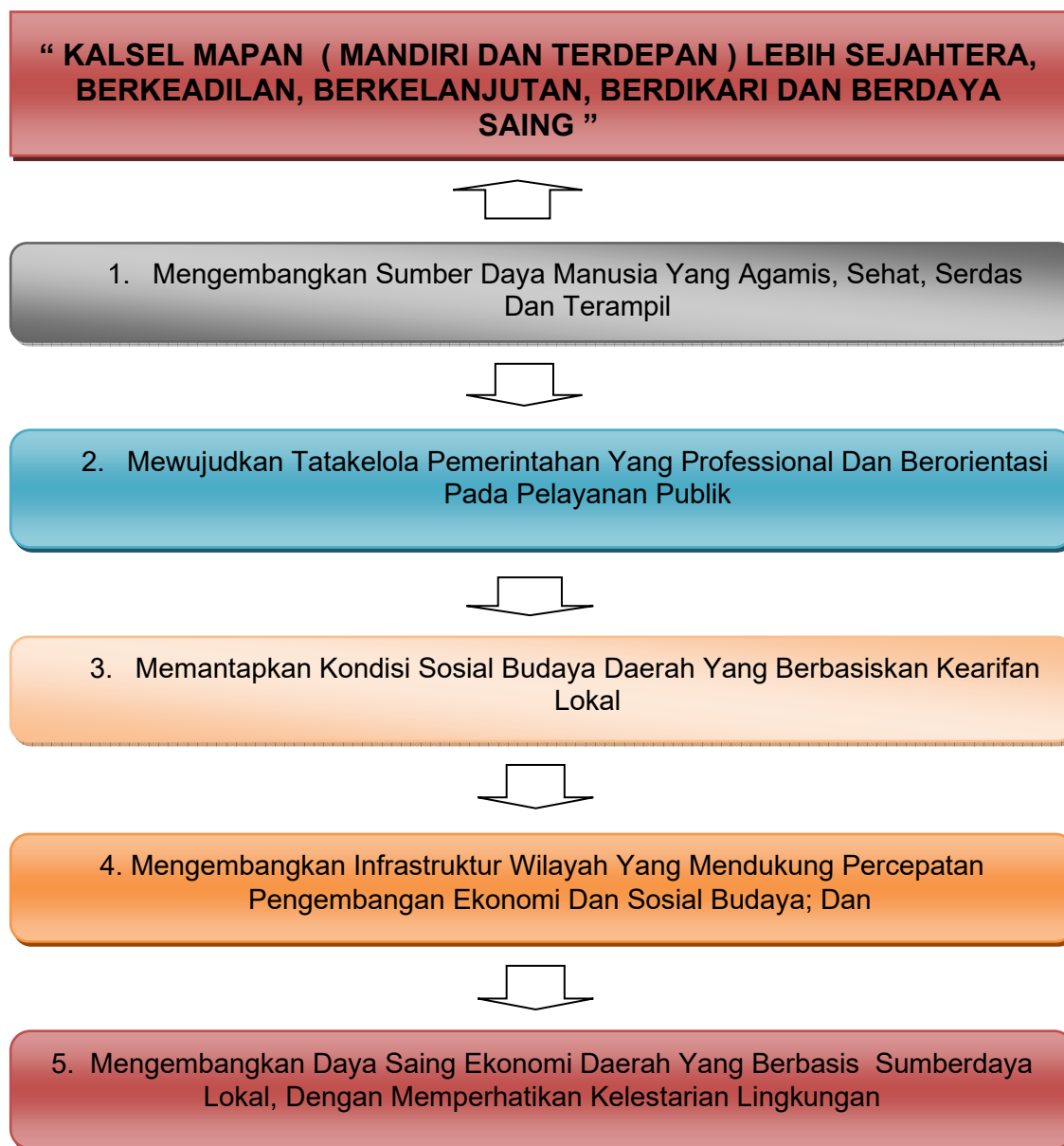
“ Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing ”

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil;
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik;
3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal;
4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya; dan
5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk lebih jelasnya bahwa untuk menjamin terwujudnya Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, dibutuhkan 5 (lima) misi dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1. Hubungan Visi dan Misi



Alur atau proses kegiatan pekerjaan dimulai dari Kepala Sub Bidang sebagai ujung tombak proses kegiatan dan PPTK yang kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang untuk koreksi selanjutnya disampaikan kepada pimpinan untuk mendapat arahan dan persetujuan. Adapun tahapan proses perencanaan pembangunan DPMPSTSP dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Rapat teknis bidang penanaman modal;
2. Membuat Renja Tahun 2019 mengacu ke RENSTRA SKPD di serahkan ke Bappeda Prov. Kalsel;
3. Proses Perencanaan oleh Bappeda untuk kegiatan Tahun 2019;
4. Pembuatan, pengusulan, dan penyampaian RKA-SKPD Tahun Anggaran 2018;
5. Verifikasi Renja Awal RENJA-SKPD Tahun 2019;
6. Penerbitan Renja Akhir Melalui beberapa tahap penyempurnaan;
7. Pembahasan RKA-SKPD di serahkan ke Badan Keuangan Daerah dan pengesahan dari tim verifikasi;
8. Terbitnya DPA-SKPD Tahun 2019;
9. Pembuatan Penetapan Kinerja Tahun 2019;
10. Pelaksanaan Kegiatan SKPD Tahun 2019;
11. Usul Pembuatan RKA-SKPD Perubahan Tahun 2019;
12. Pembahasan di Badan Keuangan Daerah oleh Tim verifikasi (Bappeda, Inspektorat)
13. Terbitnya DPPA-SKPD Tahun 2019;
14. Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan DPPA-SKPD Tahun 2019.

G. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN (LENGKAP, KURANG, MENCIKUPI ATAU LAINNYA)

Kondisi sarana dan prasarana DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Desember tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Kondisi Sarana dan Prasarana

| No | Jenis Perlengkapan | Jumlah | KondisiBarang | | Keterangan |
|----|--|---------|---------------|---------|--------------------------------------|
| | | | Rusak | Baik | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Gedung | 1 unit | | 1 unit | |
| 2 | Mobil Dinas Roda 4 (Innova, Avanza, Suzuki R-3) | 12 Buah | | 12 Buah | 4 Dari Pemprov, 8 Pengadaan Langsung |
| 3 | Sepeda Motor (Vixion, CBR, Supra, Vario dan Beat) | 11 Buah | | 11 Buah | Pengadaan Langsung |
| 4 | Perkakas Pengangkat Bermesin Lainnya (Mesin Generator) | 2 Buah | 1 Buah | 1 Buah | |
| 5 | Alat Pemeliharaan Tanaman | 1 Buah | | 1 Buah | Mesin Pemotong Rumput |
| 6 | Komputer | 70 Buah | 20 Buah | 50 Buah | |
| 7 | Komputer unit/ Jaringan Lainnya | 1 Buah | | 1 Buah | Server |
| 8 | Laptop | 53 Buah | | 53 Buah | |
| 9 | Personal Komputer Lainnya | 13 Buah | | 13 Buah | |
| 10 | Printer | 57 Buah | 17 Buah | 40 Buah | |
| 11 | Scaner | 5 Buah | | 2 Buah | |
| 12 | Peralatan Studio Visual | 9 buah | | 9 Buah | kamera |
| 13 | Peralatan Studio Visual | 8 Buah | 8 Buah | | UPS |
| 14 | Peralatan Studio Visual | 11 Buah | | 11 Buah | Alat2 sound system |
| 15 | Peralatan Studio Visual | 1 Set | | 1 Set | Kamera CCTV |
| 16 | Faxsimal | 1 Buah | | 1 Buah | |

| No | Jenis Perlengkapan | Jumlah | KondisiBarang | | Keterangan |
|----|---------------------------------|---------|---------------|---------|-----------------------|
| | | | Rusak | Baik | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Mesin Tik | 8 Buah | | 8 Buah | |
| 18 | Camera DSLR | 1 Buah | | 1 Buah | Merk Nikon |
| 19 | Kamera Digital | 1 Buah | | 1 Buah | Merk Fujifilm |
| 20 | Proyektor | 3 Buah | | 3 Buah | |
| 21 | Hardisk | 1 Buah | | 1 Buah | |
| 22 | Filling Kabinet | 63 Buah | 5 Buah | 58 Buah | |
| 23 | Almari Besi | 20 Buah | 4 Buah | 16 Buah | |
| 24 | Kursi Kerja | 41 Buah | | 41 Buah | |
| 25 | Meja Kerja | 71 Buah | | 71 Buah | |
| 26 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 2 Buah | | 2 Buah | |
| 27 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 5 Buah | | 5 Buah | |
| 28 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 14 Buah | | 14 Buah | |
| 29 | Meja Rapat Pejabat | 11 Buah | | 11 Buah | Ruang Kepala dan Aula |
| 30 | Kursi kerja Pejabat Eselon II | 2 Buah | | 2 Buah | |
| 31 | Kursi kerja pejabat Eselon IV | 18 Buah | 5 Buah | 13 Buah | |
| 32 | Kursi kerja diruang Pejabat Ess | 78 Buah | | 78 Buah | |
| 33 | Kursi Tamu diruang Pejabat Ess | 2 Set | | 2 Set | |
| 34 | Lemari Arsip untuk Arsip | 4 Buah | | 4 Buah | Lemari kayu kaca |

| No | Jenis Perlengkapan | Jumlah | KondisiBarang | | Keterangan |
|----|-------------------------------------|---------|---------------|---------|----------------------------|
| | | | Rusak | Baik | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dinamis | | | | |
| 35 | Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis | 39 Buah | | 39 Buah | Lemari besi |
| 36 | Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis | 4 Buah | | 4 Buah | Lemari besi kaca |
| 37 | Meja Fax | 1 Buah | | 1 Buah | |
| 38 | Meja Receptionis | 1 Buah | | 1 Buah | |
| 39 | Meja Tambahan | 1 Buah | | 1 Buah | Meja Kecil di Ruang Kepala |
| 40 | Bangku tunggu | 7 Buah | 1 Buah | 6 Buah | |
| 41 | Sofa | 9 Buah | | 9 Buah | |
| 42 | Rak TV | 1 Buah | | 1 Buah | |
| 43 | AC | 31 Buah | 4 Buah | 27 Buah | |
| 44 | Kipas Angin | 13 Buah | | 13 Buah | |
| 45 | Kendaraan Roda 2 | 2 Buah | | 2 Buah | |
| 46 | Lemari Es | 5 Buah | | 5 Buah | |
| 47 | TV | 11 Buah | | 11 Buah | |
| 48 | Meubelair lainnya | 2 Buah | | 2 Buah | |
| 49 | stabilizer | 3 Buah | | 3 Buah | |
| 50 | Penyekat | 2 Set | | 2 Set | |
| 51 | Alat Pengukur waktu | 6 Buah | | 6 Buah | |
| 52 | Dispenser | 4 Buah | | 4 Buah | |
| 53 | Peralatan Studio dan Film | 1 Paket | | 1 Paket | |
| 54 | Peralatan Personal Komputer Lainnya | 28 Buah | | Baik | Rusak |

| No | Jenis Perlengkapan | Jumlah | KondisiBarang | | Keterangan |
|----|-------------------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------|
| | | | Rusak | Baik | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | (Flashdisk dan Tinta Botol) | | | | |
| 55 | Brankas | 2 Buah | | 2 Buah | |
| 56 | Papan Visual | 1 Buah | | 1 Buah | |
| 57 | Alat Penghancur Kertas | 2 Buah | | 2 Buah | |
| 58 | Lemari Kayu | 13 Buah | 4 Buah | 9 Buah | |
| 59 | Lemari Kaca | 1 Buah | | 1 Buah | |
| 60 | Alat Penyimpanan Lainnya | 2 Buah | | 2 Buah | Credensa Ruang Receptionis |
| 61 | Papan Nama Instansi | 1 Buah | | 1 Buah | |
| 62 | Mesin Foto Copy | 4 Buah | | 4 Buah | |
| 63 | Meja Rapat | 27 Buah | | 27 Buah | |
| 64 | Kursi Rapat | 84 Buah | | 84 Buah | |
| 65 | Telepon (Pabx) | 1 Set | | 1 Set | Server |
| 66 | Sound System | 1 Set | | 1 Set | |
| 67 | Alat Dapur | 1 Set | | 1 Set | Rak piring dan peralatan dapur |
| 68 | Jam Mekanis | 13 Buah | 8 Buah | 5 Buah | |
| 69 | Karpet | 10 Set | Rusak | Baik | di Ruang Musholla dan Ruang Kepala |
| 70 | Korden | 2 Set | | 2 Set | |
| 71 | Kaca Bening | 3 Buah | | 3 Buah | |
| 72 | Mesin Absensi | 2 Buah | 1 Buah | 1 Buah | |
| 73 | Alat Kantor Lainnya (Infocus) | 3 Buah | 2 Buah | 1 Buah | 2 buah rusak di Ruang Aula |
| 74 | Alat Kantor Lainnya | 2 Buah | | 2 Buah | Ruang Kepala dan Rapat |

| No | Jenis Perlengkapan | Jumlah | KondisiBarang | | Keterangan |
|----|------------------------------------|--------|---------------|--------|----------------------|
| | | | Rusak | Baik | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | (Partisi) | | | | |
| 75 | Alat Kantor Lainnya (Wallpaper) | 1 Buah | | 1 Buah | Ruang Kepala |
| 76 | Alat Rumah Tangga Lainnya | 1 Buah | 1 Buah | | Alat Penyedot Debu |
| 77 | Alat Rumah Tangga Lainnya | 8 Buah | 8 Buah | | UPS |
| 78 | Alat Rumah Tangga Lainnya | 2 Buah | | | Granit dan Backdroft |
| 79 | Alat Rumah Tangga Lainnya | 1 Buah | | 1 Buah | Mesin pompa air |

H. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

Kalimantan Selatan termasuk daerah yang relatif aman dan kondusif sebagai tempat berinvestasi sekalipun ada beberapa permasalahan yang memerlukan penyelesaian yang arif dan bijaksana.

Secara umum permasalahan investasi di Kalimantan Selatan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan belum optimal, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota khususnya dalam penanganan pelayanan.
- b. Pentingnya peningkatan kemampuan aparatur DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara professional sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Perlunya peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN.

- d. SOP dan Flowchart dari SKPD yang melimpahkan wewenangnya, belum semuanya ke DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan karena terkendala adanya Peraturan Kementerian/Lembaga masing-masing SKPD.
- e. Tim Teknis tidak berada dalam satu tempat sehingga pihak PTSP harus menyampaikan kembali untuk permintaan pertimbangan teknis yang berhubungan dengan permohonan izin tertentu.
- f. Jaringan internet kurang optimal sehingga proses perizinan yang dilakukan secara online tidak sesuai dengan ketentuan SOP.
- g. Untuk perizinan disektor perikanan (izin kapal) dan disektor perhubungan (izin perpanjangan trayek yang menjadi kewenangan) proses perizinan sudah dilakukan secara online, maka bagi pemohon minimal harus mempunyai HP android agar dapat mengaksesnya.

2. Solusi

- a. Melengkapi beberapa permasalahan tersebut di atas dengan memanfaatkan Tim TASK FORCE telah diupayakan penyelesaiannya baik Task Force di pusat maupun di daerah. Hal ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tugas dari pada Tim Task Force ini meliputi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh para investor khususnya investor PMA/PMDN.
- b. Melakukan rapat-rapat koordinasi guna pemecahan masalah yang terkait dengan stakeholder.
- c. Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelatihan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.
- d. Pembinaan dan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan, agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

I. PRESTASI/ PENGHARGAAN YANG DIRAIH

1. Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik **Kategori Sangat Baik** tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
2. Sertifikat SMM ISO 9001:2015.
3. Juara II Stand Terbaik Pameran Produk Khas/Unggulan dan Peluang Investasi Daerah di Batam
4. Juara I Stand Terbaik UMKM/IKM dan Investasi Daerah 2019 di Bali
5. Juara I stand terbaik BITTRA Bandung Expo 2019 di Bandung
6. Stand terbaik Bidang Informasi Investasi MIATTEX EXPO 2018
7. Stand terbaik Pameran Investasi ke PPIP Surabaya Expo 2019 di Surabaya

J. HAL-HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU DILAPORKAN

-

BAB IV DEKONSENTRASI

Dekonsentrasi yang diterima

1. Dasar Hukum

DIPA Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)
Nomor 065.01.159002/2019

2. Instansi Dekonsentrasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)

3. Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2019 adalah sebesar Rp446.192.600,00 atau 96,43 persen dari anggaran belanja sebesar Rp462.716.500 . Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

| URAIAN | 2019 | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | Anggaran | Realisasi | % |
| Belanja Barang | 462.716.000 | 446.192.600 | 96,43 % |
| Total Belanja Kotor | 462.716.000 | 446.192.600 | 96,43 % |
| Pengembalian Belanja | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 462.716.000 | 446.192.600 | 96,43 % |

5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dana dekonsentrasi yang diturunkan BKPM RI kepada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk mengawasi perusahaan baik PMA maupun PMDN yang melaksanakan kegiatannya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan target 30 Perusahaan, adapun pelaksanaannya DPMPTSP dapat merealisasikan sebanyak 30 Perusahaan sehingga capaian kinerja sebesar 100%

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Kerjasama dengan pihak ketiga

1. Mitra yang Diajak Kerjasama
 - a. PT.Sucofindo (Persero) yang memberikan serangkaian jasa konsultasi dan audit untuk mewujudkan pelayanan prima dan Sertifikasi ISO 9001:2015.
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia.
2. Bidang Kerjasama
 - a. Sertifikasi ISO 9001:2015
 - b. Identifikasi/Kajian Potensi Sektoral oleh LPPM STIE Indonesia
 - c. Identifikasi Potensi Kerbau Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara
 - d. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 021 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021
3. Nama Kegiatan
 - a. Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbasis ISO 9001
 - b. Identifikasi Potensi dan Evaluasi Kebijakan Investasi
4. SKPD Penyelenggara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
DPMPTSP bekerjasama dengan PT.Sucopindo dan LPPM STIE Indonesia Banjarmasin.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD

- a. Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbasis ISO 9001 Rp150.000.000.
- b. Identifikasi Peluang dan Potensi Investasi Daerah Rp350.000.000.

6. Jangka Waktu Kerjasama

- a. Jadwal pelaksanaan kegiatan Pendampingan pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
- b. Jadwal Pelaksanaan kegiatan Identifikasi Peluang dan Potensi Investasi Daerah yaitu pelaksanaan pekerjaan penelitian adalah selama 80 (delapan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

7. Hasil (Output) dari Kerjasama

- a. Sertifikat ISO 9001:2015.
- b. Kegiatan Identifikasi Peluang dan Potensi Investasi menghasilkan 2 Dokumen

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LPPD TAHUN 2019

Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD terdiri dari :

1. Lampiran 1.1 : Tataran Pengambil Kebijakan

Tabel 6.1. Tataran Pengambil Kebijakan

| Nomor IKK | IKK | Jenis Data | Capaian Kinerja | Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan |
|-----------|--|--|-------------------|---|
| 39 | Jumlah persetujuan investasi | Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2019, sebanyak 17 ijin dengan total nilai investasi sebesar Rp18,681,095,726,403 (target Rp11.700.000.000.000) | Tercapai | Daftar ijin dan realisasi Investasi yang dikeluarkan oleh SKPD yg mengelola investasi Pemprov pada tahun 2019 |
| 18.107 | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Investasi (milyar rupiah) | Realisasi Investasi thn 2018 sebesar Rp11.705.600.000.000 Realisasi Investasi 2019 sebesar Rp15.654.500.000.000 | Meningkat 34 % | FC Daftar rincian realisasi PMDN tahun 2018 dan 2019 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang |

2. Lampiran 1.2 : Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 6.2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Selatan

| NO | IKK | Rumus | Jenis Data | Satuan Elemen Data | Capaian Kinerja |
|----|---|---|---|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD | Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program | 1 | 100% |
| 2 | Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) | Ada atau tidak ada | <p>Apabila Ada,</p> <p>sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengendalian Dokumen 2. SOP Pengendalian Rekaman 3. SOP Internal Audit 4. SOP Pengendalian Produk yang tidak sesuai 5. SOP Tindakan Perbaikan 6. SOP Tindakan Manajemen 7. SOP Pencairan Anggaran Perjalanan Dinas 8. SOP Penyusunan Laporan Kinerja 9. SOP Perencanaan dan Penganggaran 10. SOP Cuti 11. SOP Evaluasi Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal 12. SOP Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha 13. SOP Perencanaan dan Deregulasi 14. SOP Pameran Investasi 15. SOP Pembuatan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi Daerah | 25 SOP | Ada |

| | | | | | |
|----|---|---|---|----------------------|-----------------|
| | | | 16. SOP Monitoring Evaluasi Perkembangan dan Permasalahan Investasi 17. SOP Penanganan Tindak lanjut dari kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Daerah 18. SOP Penanganan Permintaan Informasi 19. SOP Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal 20. SOP Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non perizinan dengan Peninjauan Lapangan tanpa pertimbangan teknis 21. SOP Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan tanpa peninjauan Lapangan dengan Pertimbangan Teknis 22. SOP Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan tanpa peninjauan lapangan tanpa pertimbangan teknis 23. SOP Pelayanan secara elektronik 24. SOP Penanganan Pengaduan 25. SOP Pencabutan Perizinan dan Non Perizinan | | |
| 3 | Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN | Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% | -PERDA pelaksanaan sebanyak ----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak ---- | 1 1 | |
| 4 | Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi | Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% | - Jabatan yang ada sebanyak --- - Jabatan yang harus ada, sebanyak ---- | 23 23 | 100% |
| 5 | Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD | Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD | Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ---- ----. 1. Arsiparis 2. Pustakawan 3. Pranata Komputer | 1 Jabatan Fungsional | ada |
| 6 | Rasio PNS Provinsi | Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi | - PNS SKPD , sebanyak ----. personil - Total PNS Provinsi, sebanyak ---- personil | 54 12.017 | 0,45% |
| 7 | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan | Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah pejabat SKPD yang ada x 100% | - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak --- -- org. - Pejabat yang ada, sebanyak ---- org. | 23 23 | 100% |
| 8 | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan | Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah pejabat SKPD yang ada x 100% | - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak --- org. - Jabatan yang ada, sebanyak --- jbt. | 23 23 | |
| 9 | Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD | Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya | Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ---- jenis, yg terdiri dari: 1 RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD | 3 jenis dokumen | 3 jenis dokumen |
| 10 | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% | - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ----- program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ----- | 6 6 | 100% |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|--------------------------|
| | Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD | Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% | - Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. | 6 6 | 100% |
| 12 | Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD | Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% | - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. | 6 6 | 100% |
| 13 | Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD | Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% | - Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, ----- - Total Belanja APBD, sebesar Rp ----- | Rp 16.308.743.750 Rp 16.308.743.750 | 100,00% |
| 14 | Belanja modal terhadap total belanja SKPD | Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% | - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ----- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- | Rp 1.201.515.000 Rp 16.308.743.750 | 7,37% |
| 15 | Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa | total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% | - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -- - Total belanja barang jasa SKPD, sebesar Rp. ----- | Rp 187.601.500 Rp 7.888.427.750 | 2,38% |
| 16 | Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD | total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% | - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- | Rp 187.601.500 Rp 16.308.743.750 | 1,15% |
| 17 | Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) | | Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) | 3 Jenis | Ada sebanyak 3 jenis |
| 18 | Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD | Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD | Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Kartu Inventaris Barang (KIB) - Berita Acara Inventarisasi BMD | ada | ada |
| 19 | Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD | Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % | - Asset yang tidak digunakan, sebanyak ----- aset (Rp . . .) - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ----- aset (Rp . . .) | Rp 330.161.613 Rp 40.418.396.343 | 0,82% |
| 20 | Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 6. Lain-lain | Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi | Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 6. website (media online) | ada ada ada tidak ada ada | Jumlah sebanyak 5 jenis. |
| 21 | Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat | Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik | Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----- | ada | ada |

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Promosi, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin dengan memperhatikan point-point yang dipaparkan sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dapat dikatakan berhasil, karena target yang ada dapat dicapai dengan baik.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2019 adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Strategik yang di dalamnya berisi sasaran-sasaran stratejik yang harus dipertanggung jawabkan. Sasaran stratejik tersebut merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh instansi pada tahun 2019 dan dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2019. Dengan demikian di dalam LKPJ dan LPPD ini DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah berusaha menjawab dan membuktikan bahwa amanah yang diberikan kepada instansi dapat dipertanggung jawabkan.

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan 3 (tiga) indikator didalamnya, dimana salah satunya menjadi indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021.

Pada indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN ditargetkan sebesar 10,5 triliun rupiah. Adapun realisasinya sebesar **15,65 triliun rupiah**, sehingga kinerja mencapai **149,09%**.

Pada indikator Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi ditargetkan sebesar 11,7 triliun rupiah. Adapun realisasinya sebesar **18,68 triliun rupiah**, sehingga kinerja mencapai **159,67%**.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan B dengan nilai 82,50. Adapun realisasinya adalah **B dengan nilai 86,79**, sehingga kinerja mencapai **105,20%**.

B. SOLUSI MENGATASI KENDALA UNTUK PENINGKATAN KINERJA MENDATANG

Dalam rangka untuk mengurangi permasalahan yang ada, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengupayakan :

1. Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan sinkronisasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Mengikuti kegiatan/event promosi potensi daerah, baik berupa pameran, Rapat Koordinasi, pertemuan antar BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para investor, dan menggalang kemitraan.
3. Pelaksanaan evaluasi LKPM
4. Melakukan rapat-rapat koordinasi regional guna pemecahan masalah investasi.
5. Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelahitan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.
6. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Melengkapi penyelesaian permasalahan tersebut di atas dengan memanfaatkan Tim TASK FORCE telah diupayakan penyelesaiannya baik Task Force di pusat maupun didaerah. Hal ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tugas dari pada Tim Task Force ini

meliputi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh para investor khususnya investor PMA/PMDN.

8. Melakukan rapat-rapat koordinasi guna pemecahan masalah yang terkait dengan stakeholder.

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas, maka strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:


1. Anggaran Belanja Kegiatan Langsung yang merupakan bagian dari Rencana Strategik 2016 – 2021 agar benar-benar dapat disusun sesuai kaidah-kaidah yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip-prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif);
3. Pengawasan/pengendalian internal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna;
4. Petugas yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar benar-benar memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN

REALISASI INVESTASI

| INDIKATOR | TAHUN | SATUAN | CAPAIAN |
|---------------------------------------|-------|--------|--------------------|
| - Penanaman Modal Asing (PMA) | 2010 | US\$ | 432,879,620 |
| | 2011 | US\$ | 353,220,440 |
| | 2012 | US\$ | 1,032,024,730 |
| | 2013 | US\$ | 652,191,340 |
| | 2014 | US\$ | 351,982,810 |
| | 2015 | US\$ | 713,729,850 |
| | 2016 | US\$ | 249,400,000 |
| | 2017 | US\$ | 243,800,000 |
| | 2018 | US\$ | 129,147,300 |
| | 2019 | US\$ | 372,900,000 |
| - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) | 2010 | Rp | 445,643,890,000 |
| | 2011 | Rp | 1,737,543,170,000 |
| | 2012 | Rp | 481,676,610,000 |
| | 2013 | Rp | 2,046,964,560,000 |
| | 2014 | Rp | 1,917,967,820,000 |
| | 2015 | Rp | 2,604,400,000,000 |
| | 2016 | Rp | 6,163,000,000,000 |
| | 2017 | Rp | 2,981,900,000,000 |
| | 2018 | Rp | 9.975.240.000.000 |
| - Total Investasi | 2019 | Rp | 10.061.000.000.000 |
| (PMA US\$1=Rp10.000 + PMDN) | 2010 | Rp | 4,774,440,090,000 |
| | 2011 | Rp | 5,269,747,570,000 |
| | 2012 | Rp | 10,801,923,910,000 |
| | 2013 | Rp | 8,568,877,960,000 |
| | 2014 | Rp | 5,437,795,920,000 |
| | 2015 | Rp | 9,197,658,500,000 |
| (PMA US\$1=Rp15.000 + PMDN) | 2016 | Rp | 9,504,960,000,000 |
| | 2017 | Rp | 6,248,820,000,000 |
| | 2018 | Rp | 11.705.813.900.000 |
| | 2019 | Rp | 15.654.500.000.000 |
| - Pertumbuhan Investasi | 2011 | % | 10.37% |
| | 2012 | % | 104.98% |
| | 2013 | % | -20.67% |
| | 2014 | % | -36.54% |
| | 2015 | % | 58.83% |
| | 2016 | % | 10.05% |
| | 2017 | % | -33.85% |
| | 2018 | % | 87,32% |
| 2019 | % | 34,00% | |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Ir. H. Nafarin, MP
 NIP. 19620513 198903 1 001

NILAI PERSETUJUAN INVESTASI / RENCANA INVESTASI

| INDIKATOR | TAHUN | SATUAN | CAPAIAN |
|-----------------------------|-------|--------|--------------------|
| - Izin Investasi PMA | 2010 | US\$ | 696,332,300 |
| | 2011 | US\$ | 464,999,150 |
| | 2012 | US\$ | 1,439,532,490 |
| | 2013 | US\$ | 71,313,800 |
| | 2014 | US\$ | 333,767,670 |
| | 2015 | US\$ | 854,925,400 |
| | 2016 | US\$ | 235,599,500 |
| | 2017 | US\$ | 357,406,400 |
| - Izin Investasi PMDN | 2010 | Rp | 956,589,410,000 |
| | 2011 | Rp | 11,415,368,000,000 |
| | 2012 | Rp | 21,018,178,000,000 |
| | 2013 | Rp | 7,316,319,450,000 |
| | 2014 | Rp | 17,624,807,310,000 |
| | 2015 | Rp | 1,501,468,400,000 |
| | 2016 | Rp | 5,962,929,900,000 |
| | 2017 | Rp | 7,890,479,600,000 |
| - Total Rencana Investasi | | | |
| (PMA US\$1=Rp10.000 + PMDN) | 2010 | Rp | 7,919,912,410,000 |
| | 2011 | Rp | 16,065,359,500,000 |
| | 2012 | Rp | 35,413,502,900,000 |
| | 2013 | Rp | 8,029,457,450,000 |
| | 2014 | Rp | 20,962,484,010,000 |
| | 2015 | Rp | 10,050,722,400,000 |
| (PMA US\$1=Rp13.000 + PMDN) | 2016 | Rp | 9,025,723,400,000 |
| | 2017 | Rp | 12,536,762,800,000 |
| | 2018 | Rp | 21.750.612.100.000 |
| | 2019 | Rp | 18.681.095.726.403 |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Ir. H. Nafarin, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 198903 1 001

REKAPITULASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------|--------------------|-------------------|--|---|---|--|
| JUMLAH PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIKELUARKAN (dalam unit) | 1.139 | 3.618 (217,65%) | 3.450 (-4,64%) | 3.676 (6,55%) | 2.982 (-18,87%) | 2.464 | 1.790 |
| REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (dalam rupiah) | 50.350.000 | 264.895.500 | 261.841.500 | 505.027.300 (target: 464.000.000) Capaian: 108,84% | 370.663.300 (target: 464.000.000) Capaian: 91,75% | 290.325.100 (target: 404.000.000) Capaian: 71,86% | 82.758.000 (target: 404.000.000) Capaian: 20,48% |

2018 Dengan rincian:

1. Bidang Perizinan Produksi dan Industri, sebanyak 88 Buah (Total 1.359 buah)
2. Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial, sebanyak 40 Buah (Total 431 buah)
3. Bidang Perizinan Penanaman Modal, sebanyak 0 buah (Total 0 Buah)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Ir. H. Nafarin, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 198903 1 001